

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Sari dan Astika (2018). Penelitian ini mengenai pengaruh opini going concern, finansial distress, dan kepemilikan institusional terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 140 perusahaan manufaktur dengan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan yang berbentuk asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa opini going concern dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan manufaktur untuk melakukan *voluntary auditor switching*, sedangkan finansial distress tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan manufaktur untuk melakukan *voluntary auditor switching*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Diana (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran KAP, financial distress, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sampel yang digunakan adalah 99 perusahaan yang

telah dipilih sesuai kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai metode analisis statistik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan financial distress, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016). Penelitian ini meneliti pengaruh opini audit, finansial distress, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2010-2014. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan finansial distress tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Stephanie dan Prabowo (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, kualitas audit, kesulitan keuangan dan fee audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*, sedangkan pergantian manajemen, audit kualitas, kesulitan keuangan, opini audit dan biaya audit tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Luthfiyati (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap *voluntary auditor switching*. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan auditor independen yang dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP, dan audit tenure berpengaruh positif yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Wijaya dan Rasmini (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit fee, opini going concern, financial distress, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *voluntary auditor switching*. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2008-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*), dikarenakan variabel dependen menggunakan variabel dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit fee dan opini going concern berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan financial distress, ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Mahindrayogi dan Suputra (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik, pertumbuhan perusahaan, opini going concern, dan kesulitan keuangan terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur sebagai populasi. Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik dengan jumlah sampel 42

perusahaan berdasarkan hasil dari *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik dan pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh secara positif terhadap *voluntary auditor switching*. Sementara variabel opini *going concern* dan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Fang, et al., (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching* pada perusahaan di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara opini audit, pergantian manajemen, dan kesulitan keuangan terhadap *voluntary auditor switching*. Teknik analisis yang digunakan adalah *multiple regression*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, pergantian manajemen, dan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Wibowo dan Rahmawati (2019). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, kredibilitas auditor, dan audit tenure baik secara simultan dan parsial terhadap *voluntary auditor switching*. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik untuk mengungkapkan apakah ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, kredibilitas auditor, dan audit tenure tidak memiliki pengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Alisa, et al., (2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh opini audit, pergantian manajemen, finansial distress, dan ukuran KAP terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian ini menggunakan data sekunder

dari situs resmi PT Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, Pergantian Manajemen, dan ukuran KAP memiliki pengaruh positif pada *voluntary auditor switching*. Sementara itu, finansial distress tidak mempengaruhi *voluntary auditor switching*.

2.2 Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional, opini audit, ukuran KAP yang dipakai, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada kajian teori sebagai berikut:

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan sebagian kewenangan kepada *agent* untuk pengambilan keputusan yang terbaik bagi *principal*. *Principal* dalam teori ini adalah pemilik perusahaan, seperti pemegang saham/investor yang menyediakan modal, dana dan fasilitas bagi kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan, *agent* adalah manajemen atau manajer yang mengelola kegiatan operasional perusahaan.

Adanya pemisahan kepemilikan antara *principal* dan *agent* menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat memicu munculnya suatu permasalahan yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan (*agency conflict*) merupakan suatu kondisi yang terjadi karena adanya ketidaksamaan tujuan, dimana *agent* memiliki

kesempatan untuk mencapai keinginan pribadi mereka dan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. *Principal* tentu ingin mendapatkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka miliki dengan mendorong manajemen perusahaan agar dapat memberikan laba yang maksimal kepada pemilik perusahaan (*principal*), tetapi manajemen juga mengharapkan kompensasi (imbalan) yang sesuai atas kinerja mereka terhadap perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan, memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan informasi (*asymmetri information*) yang juga dapat memicu terjadinya konflik keagenan. Kesenjangan informasi (*asymmetri information*) merupakan suatu kondisi yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pihak manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Adanya asimetri informasi ini mendorong manajemen untuk berperilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Perilaku ini muncul karena manajemen ingin memenuhi kepentingannya sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal tersebut dapat mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang *principal* tidak ketahui, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada agent dan pihak *principal* akan mengawasi segala perilaku yang dilakukan oleh *agent*.

Konflik keagenan ini dapat diminimalisasi dengan melakukan kontrol atau pengawasan yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, tetapi hal ini dapat menimbulkan biaya. Biaya yang dikeluarkan *principal* untuk menjalankan pengawasan ini disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). Wallace (1985) menyatakan bahwa audit merupakan cara yang dapat mengurangi biaya agensi akibat adanya perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajer dan asimetri informasi. Jika audit dilakukan oleh auditor yang independen, *agent* dapat membuktikan bahwa kepercayaan dari *principal* tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi *agent*. Oleh karena itu,

diperlukan adanya perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor independen dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh agent. Auditor independen berperan sebagai penengah antara kedua pihak (*agent* dan *principal*) yang mempunyai kepentingan berbeda dalam mengelola keuangan perusahaan. Independen dalam hal ini berarti akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan.

Biaya keagenan (*agency cost*) juga dapat diminimalisasi dengan adanya kepemilikan institusional. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi *agent*. Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh investor institusional diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk dalam memilih auditor independen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Peran auditor adalah untuk menentukan apakah laporan yang disiapkan oleh manajemen telah memenuhi ketentuan kontrak dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (Messier, 2014:7). Oleh karena itu, mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) adalah salah satu keinginan manajemen. Opini dari seorang auditor dapat mempengaruhi pandangan pihak eksternal mengenai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Putra & Suryanawa, 2016). Pihak eksternal tersebut seperti pemegang saham institusional yang mengharapkan kinerja manajemen optimal dalam mengelola perusahaan. Jika mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*qualified*), maka pihak eksternal akan cenderung memandang negatif kinerja manajemen. Hal ini yang dapat menjadi dasar terjadinya perilaku *voluntary auditor switching* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan juga akan memerlukan auditor independen dan bereputasi tinggi untuk mengurangi

biaya agensi sehingga perusahaan cenderung akan mempertahankan auditornya untuk menekan biaya agensi. Adanya persepsi bahwa klien lebih percaya pada data yang di audit oleh auditor bereputasi baik menyebabkan manajemen tidak akan mengganti jika perusahaan telah diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP big 4 yang dianggap memiliki reputasi yang baik. Hal ini juga yang dapat menjadi dasar perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*

2.2.2 Teori Audit

2.2.2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens, *et al.*, (2015:2) audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi yang tingkat kesesuaian antara asersi tersebut ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2.2 Tujuan Audit

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah mengangakat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens, *et al.*, (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan suatu pendapat bagi pemakai laporan keuangan yang diberikan oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.

Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten, yaitu auditor. Pendapat auditor dapat menambah tingkat keyakinan pemakai yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Tujuan audit pada umumnya adalah untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan, ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi, serta pengamanan aktiva. Oleh karena itu, tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan penyajian dari pelaporan keuangan yang sesuai dengan standards auditing.

2.2.2.3 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens, *et al.*, (2015:12), terdapat tiga jenis utama audit yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu :

1. Audit operasional (*Operational Audit*)

Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian

dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi.

2. Audit ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, peraturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu sendiri.

3. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Dalam audit ini, auditor memperoleh, mengumpulkan bukti, dan mengevaluasi tentang laporan keuangan perusahaan agar dapat memberikan pendapat dan menetapkan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan atau salah saji lainnya.

2.2.3 Teori Auditor

2.2.3.1 Pengertian Auditor

Menurut Mulyadi (2013:1) auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh pihak ketiga diantara manajemen dan pemegang saham, yang dianggap mempunyai sikap independen yaitu auditor. Manajemen (agen) memerlukan auditor independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal dapat dipercaya dan pemegang saham (prinsipal) memerlukan auditor independen untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan

dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi, 2014). Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Sikap independensi sangat diperlukan bagi seorang auditor dalam menjalankan perannya. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan yang mengharuskan memberi kewajaran laporan keuangan kliennya. Auditor diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara obyektif. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor harus bersikap jujur dalam mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan yang diauditnya, termasuk tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh kliennya.

2.2.3.2 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens, *et al.*, (2012:14) pengklasifikasian auditor terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Akuntan Publik Terdaftar

Akuntan publik yang menjual jasanya terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan menjual jasanya juga sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Tugas auditor pemerintah selain mengaudit informasi laporan keuangan, seringkali juga melakukan evaluasi, efisiensi, dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak adalah auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

4. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja di suatu perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Perbedaan antara keempat jenis auditor terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

2.2.4 Teori Kepemilikan Institusional

Menurut Sutedi (2012:21), kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan perbankan investasi.

Menurut Runtu, *et al.*, (2019) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu lembaga seperti asuransi, reksadana, perusahaan-perusahaan diluar dari tempat menanamkan saham maupun lembaga pemerintahan.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas persentase saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham yang menimbulkan adanya *agency cost*. Berdasarkan teori agensi, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi *agent*. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal

terhadap perusahaan sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang. Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting dalam proses monitoring manajemen secara efektif.

Pemegang saham institusional yang memiliki kepemilikan saham besar memiliki kewenangan untuk mengawasi pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai pengawas kinerja manajemen dikuatkan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila pemegang saham institusional tidak cukup puas atas kinerja pihak manajemen, maka mereka akan menjual sahamnya di pasar modal. Oleh karena itu, pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan pihak institusional. Adanya kepemilikan saham yang besar oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku oportunistik manajer yaitu mementingkan kepentingannya sendiri yang dapat merugikan pemegang saham institusional. Tingginya persentase kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan menjadi salah satu pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan manajemen termasuk dalam pemilihan jasa audit yang independen (KAP) untuk proses monitoring agar laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya dan dinilai baik oleh para pemakai laporan keuangan.

2.2.5 Teori Opini Audit

Opini audit adalah kesimpulan yang dinyatakan dalam bentuk pendapat mengenai keadaan laporan keuangan secara keseluruhan. Opini yang diberikan oleh auditor terkait kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan menjadi sumber informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemakai laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2014:19), opini audit merupakan pernyataan audit dalam bentuk pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material dan didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Pemberian opini audit berdasarkan pada isi laporan keuangan tersebut apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Menurut SPAP seksi 508 yang bersumber dari PSA Nomor 29 tentang Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan, terdapat lima tipe opini auditor, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

Yaitu keadaan tertentu yang mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tersebut meliputi, sebagian pendapat auditor didasarkan atas laporan auditor independen lain, keadaan-keadaan yang menyimpang dari prinsip yang berlaku umum, keadaan-keadaan yang menimbulkan kesangsian auditor terhadap kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan akan hal tersebut telah memadai, dan sebagainya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan yang

pengecualian, maka auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Auditor harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan jika menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, maka laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

2.2.6 Teori Ukuran KAP Yang Dipakai

2.2.6.1 Pengertian Ukuran KAP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah organisasi/badan usaha yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan pelayanan jasa akuntansi profesional kepada perusahaan atau masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Ukuran KAP adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Ukuran KAP di Indonesia banyak yang mengklasifikasikannya dengan menggunakan KAP yang melakukan afiliasi dengan *Big four* dan *Non-Big four*. Ukuran KAP dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan memiliki klien perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens, *et al.*, 2012).

2.2.6.2 Kategori Ukuran KAP

Menurut IAI dalam Buku Direktorat (I. A. I, 2011) mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Menurut Arens, *et al.*, (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1) Kantor Internasional Empat Besar.

Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut Kantor Akuntan Publik Internasional yaitu *Big Four*. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. KAP *Big Four* mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia dan banyak perusahaan yang lebih kecil juga.

2) Kantor Nasional.

Tiga KAP di Amerika Serikat disebut Kantor Akuntan Publik Nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar dan kota utama. KAP nasional memberikan jasa yang sama seperti KAP *Big Four* dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. Setiap KAP nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain, sehingga mempunyai kemampuan bertaraf internasional.

3) Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar.

Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam jarak yang lebih jauh.

4) Kantor Lokal Kecil.

Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang tidak melakukan afiliasi dengan *big four* (*non big four*). Pada umumnya, perusahaan mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional memiliki reputasi yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review (Zikra & Syofyan, 2019). KAP yang termasuk *big four* adalah Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Ernst and Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu.

Menurut IAI 2010, KAP di Indonesia yang telah berafiliasi dengan KAP *big four* adalah:

- 1) KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
- 2) KAP Haryanto Sahari yang berafiliasi dengan KAP Pricewaterhouse Coopers (PwC)
- 3) KAP Purwantono, Suherman dan Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst and Young (EY).
- 4) KAP Sidharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

2.2.7 Teori Pertumbuhan Perusahaan Klien

Pertumbuhan perusahaan (*company growth*) adalah kemampuan perusahaan dalam mengembangkan operasionalnya untuk meningkatkan ukuran perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan adalah ukuran seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Aprianti & Hartaty, 2016). Perusahaan yang sedang bertumbuh mengindikasikan bahwa adanya perubahan (peningkatan atau penurunan) penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami stagnancy dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan tingkat penjualan karena penjualan adalah kegiatan utama didalam suatu perusahaan. Penjualan juga dapat menunjukkan kondisi perusahaan yang dapat bertahan didalam persaingan dunia bisnis yang luas. Pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya akan menyebabkan kenaikan laba perusahaan. Laba terjadi jika penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan merupakan faktor paling penting yang dapat menentukan perusahaan untuk tetap berjalan dan berkembang. Pertumbuhan penjualan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya

dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga pendanaan internal perusahaan juga meningkat. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa terjadi penurunan laba, sehingga perusahaan cenderung mengalami bangkrut.

Tingkat pertumbuhan perusahaan adalah hal penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap investasinya. Terjadinya peningkatan pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa semakin kompleks juga kegiatan operasionalnya dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen dan pemilik, sehingga dapat meningkatkan permintaan akan independensi jasa auditor yang berfungsi untuk mengurangi biaya agensi. Perusahaan akan membutuhkan Jasa auditor independen (KAP) yang memiliki kemampuan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham ataupun pihak luar lain, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan.

2.2.8 Teori Auditor Switching

2.2.8.1 Pengertian Auditor Switching

Auditor Switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dalam penelitian ini adalah pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Bukti teoritis adanya auditor switching didasarkan pada teori agensi, Dalam teori agensi, auditor independen berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). Permintaan adanya jasa audit muncul terutama dari adanya asimetri informasi. Menurut Wijayanti (2010:18), ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimterisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor. Pada saat itu, klien akan mencari auditor yang kemungkinan besar ingin bersepakat

dengan praktik akuntansi perusahaan. Pergantian sebuah Kantor Akuntan Publik pada perusahaan dapat menciptakan lingkungan audit yang kompetitif karena dapat meningkatkan kebutuhan akan audit oleh perusahaan yang telah *go public*. Perusahaan dapat memilih Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kebutuhannya.

2.2.8.2 Jenis Auditor Switching

Auditor switching (pergantian KAP) dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu pergantian karena kewajiban rotasi audit yang diatur oleh pemerintah (*mandatory*) atau pergantian secara sukarela (*voluntary*).

1. Auditor Switching Secara Mandatory

Auditor switching secara *mandatory* dilakukan karena peraturan yang membatasi tenure, seperti di Indonesia telah di atur oleh regulasi berupa Keputusan Menteri Keuangan, keputusan ini berisi tentang pembatasan *audit tenure* atau panjangnya masa perikatan antara perusahaan dengan kantor akuntan publik (KAP). Dapat didefinisikan bahwa *mandatory auditor switching* adalah perilaku perusahaan dalam mengganti akuntan publiknya (KAP) karena didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan dan berlaku.

2. Auditor Switching Secara Voluntary

Auditor switching secara *voluntary* (sukarela) dilakukan ketika kantor akuntan publik diganti oleh perusahaan padahal belum melampaui batas *audit tenure* yang di tetapkan oleh KMK. *Voluntary auditor switching* adalah perilaku perusahaan dalam mengganti akuntan publiknya maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) atas keinginan perusahaan itu sendiri dan tidak didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam penggantian secara *voluntary*, yaitu akuntan publik mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau perusahaan yang memang ingin mengganti akuntan publik atas jasa yang diberikan. Diantara kedua kemungkinan tersebut, perhatian utama adalah pada alasan kenapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan

atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasikan klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. *Auditor switching* secara *voluntary* inilah yang menimbulkan keingintahuan pihak tertentu mengenai faktor apa saja yang menjadi pengaruh terjadinya *voluntary auditor switching* dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, hanya berfokus pada *auditor switching secara voluntary* yang diteliti dengan memperhatikan kepemilikan institusional, opini audit, ukuran KAP yang dipakai, dan pertumbuhan perusahaan klien.

2.2.8.3 Peraturan Mengenai Auditor Switching

Adanya hubungan antara auditor dengan klien yang sangat lama dapat mengurangi independensi auditor. Salah satu usaha pemerintah sebagai regulator dalam hal independensi yaitu dengan membuat peraturan mengenai *audit tenure* (masa kerja audit) ataupun kewajiban melakukan rotasi audit.

Pemerintah telah mengatur kewajiban *auditor switching* dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Regulasi ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian regulasi tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan sebagai berikut, perubahan pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Perubahan kedua adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Namun pada

tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang praktik akuntan publik dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, pembatasan hanya berlaku pada AP, yaitu selama 5 tahun berturut-turut. Peraturan baru tidak memberikan batasan waktu dalam KAP untuk mengaudit suatu entitas.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Voluntary Auditor Switching

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol atau pengawasan terhadap manajemen dalam kebijakan mengenai kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional yang menjadi jumlah pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) dapat memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan mengenai perlu atau tidaknya untuk melakukan *voluntary auditor switching* dalam perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusional juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari auditor sehingga dapat meminimalkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak auditor yang pada akhirnya menjadi penyebab dilakukannya *voluntary auditor switching*.

2.3.2 Hubungan Opini Audit Dengan Voluntary Auditor Switching

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

Nazri et al. (2012) menyatakan bahwa masalah yang paling sensitif dalam hubungan *auditor switching* adalah kualifikasi dari opini audit karena salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari auditor. Jika perusahaan menerima *qualified opinion*, maka perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* untuk mencapai tujuan manajemen dari pelaksanaan suatu audit, karena opini *qualified* mungkin mencerminkan secara negatif dari praktik pelaporan keuangan manajemen. Ketidakpuasan atas opini auditor juga dapat menyebabkan timbulnya konflik hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan klien memutuskan untuk berpindah KAP.

2.3.3 Hubungan Ukuran KAP Yang Dipakai Dengan Voluntary Auditor Switching

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Ukuran KAP menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya *voluntary auditor switching*. Suatu perusahaan akan memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi agar dapat meningkatkan kredibilitas atas laporan keuangan yang dimilikinya dimata para pemakai laporan keuangan. KAP yang berukuran besar cenderung memiliki reputasi dan tingkat keahlian yang tinggi. Perusahaan akan lebih memilih KAP yang mempunyai reputasi dan tingkat keahlian yang tinggi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang telah *go public*, karena terkait dengan pertanggungjawaban kepercayaan pemegang saham dan kepercayaan publik.

2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Perusahaan Klien Dengan Voluntary Auditor Switching

Adanya pertumbuhan perusahaan dapat memicu terjadinya *voluntary auditor switching*. Alasan utamanya adalah karena terjadi perubahan kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan akan membutuhkan auditor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih memadai tentang masalah pelaporan keuangan dibandingkan dengan auditor terdahulu untuk meningkatkan kepercayaan shareholders. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, sangat dimungkinkan perusahaan akan memilih KAP yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat, khususnya dimata pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan percaya bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan akan terus berinvestasi pada perusahaan tersebut.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Voluntary Auditor Switching

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan persentase saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan. Berdasarkan teori agensi, salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* yaitu dengan meningkatkan kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional yang besar disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut (Sari & Astika, 2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang terkonsentrasi akan dilindungi hak kepemilikannya, sehingga memiliki

kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan, salah satunya apakah perlu atau tidak untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Pada umumnya, kepemilikan institusional sebagai pemegang saham mayoritas cenderung memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga ketika pemegang saham memiliki konflik dengan auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap perusahaan, maka mereka akan melakukan *auditor switching*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajrin, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional terhadap *voluntary auditor switching*. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

2.4.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap Voluntary Auditor Switching

Opini audit merupakan hasil akhir dari suatu proses audit atas laporan keuangan klien yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi pihak pengambil keputusan ekonomi atas keandalan informasi yang ada dalam laporan keuangan klien dan merupakan pertanggungjawaban auditor atas opini yang telah diberikan kepada klien. Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak agen diasumsikan memiliki kepentingan pribadi dan ingin memaksimalkan kepentingannya. Dengan otoritas yang dimilikinya, manajemen memiliki wewenang untuk memutuskan mengganti auditor independennya.

Menurut (Faradila & Yahya, 2016) yang membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, menyatakan jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*qualified opinion*), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin akan memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djamalilleil, 2015)

menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang positif terhadap *voluntary auditor switching* sehingga opini audit cukup menentukan perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Opini Audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran KAP Yang Dipakai Terhadap Voluntary Auditor Switching

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu KAP. Perusahaan akan cenderung mencari KAP yang memiliki reputasi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan. KAP besar adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*, sedangkan KAP kecil yang berafiliasi dengan KAP *non big four*. KAP *big four* memiliki keunggulan dibandingkan KAP *non big four* dalam meyakinkan pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengklasifikasian dengan persepsi bahwa KAP *Big four* mempunyai keunggulan yaitu reputasi tinggi yang berskala universal. Dengan adanya reputasi yang tinggi menjadikan KAP *big four* lebih dipercaya dalam melakukan jasa audit sehingga perusahaan akan memakainya untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik yang dapat menarik perhatian investor maupun para pemangku kepentingan lainnya, sehingga perusahaan akan memilih KAP *big four* dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Menurut (Luthfiyati, 2016) membuktikan bahwa ukuran KAP yang dipakai berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big 4* cenderung lebih sering untuk mengganti Kantor Akuntan Publiknya dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*, sehingga perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP *big four* memiliki kecenderungan kecil untuk

berganti Kantor Akuntan Publik (KAP). Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan KAP *non big four* cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi & Walidi, 2019) bahwa ukuran KAP berpengaruh positif yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : Ukuran KAP yang Dipakai berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Perusahaan yang terus tumbuh akan cenderung untuk melakukan *voluntary auditor switching* karena kegiatan operasional perusahaan akan menjadi lebih kompleks. Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa semua individu berperilaku untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan menggunakan jasa auditor yang memiliki kemampuan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan, maka perusahaan akan merasa bahwa reputasinya akan lebih baik di masyarakat dan pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan percaya bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan mereka akan tetap berinvestasi pada perusahaan.

Menurut (Mahindrayogi & Suputra, 2016) yang membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, menyatakan bahwa semakin tingginya pertumbuhan perusahaan, hal ini akan berbanding lurus dengan permintaan adanya hasil audit yang lebih bermutu. Oleh karena itu, *auditor switching* pada perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dianggap sangat perlu untuk dilakukan karena dapat meningkatkan mutu dari laporan keuangan, selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan perusahaan klien maka semakin meningkat juga perusahaan dalam melakukan *voluntary auditor switching*.. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alansari & Badera, 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan

klien memiliki pengaruh positif signifikan pada *voluntary auditor switching*. Hal ini dikarenakan ketika suatu entitas bisnis mengalami pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat, maka perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian KAP. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H4 : Pertumbuhan Perusahaan Klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Ukuran KAP Yang Dipakai, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Adanya kepemilikan institusional sebagai pemilik saham mayoritas dalam suatu perusahaan menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam mengawasi manajemen dan pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga permintaan para pemangku kepentingan untuk memperoleh kepercayaan kepada perusahaan. Adanya permintaan jasa audit yang independen dan berkualitas dalam memberikan opini yang baik untuk laporan keuangan akan meningkatkan tingkat kepercayaan para pemegang saham.

Opini audit yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atas laporan keuangan merupakan tujuan manajemen dalam suatu audit, karena opini tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Apabila perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian (*qualified pinion*) akan mendorong perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan manajemen dan mencerminkan kinerja perusahaan yang kurang baik sehingga dapat merugikan pihak institusional dalam suatu perusahaan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan pihak institusional dan mendapatkan opini yang baik perlu dilakukan pergantian jasa audit yang memiliki reputasi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran KAP yang dipakai oleh perusahaan. Ukuran KAP yang besar cenderung memiliki reputasi yang tinggi di mata investor dibandingkan dengan KAP kecil. Investor cenderung mengandalkan jasa audit yang memiliki reputasi, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan *big four* cenderung akan mempertahankan jasa auditnya karena KAP *big four* dikenal memiliki reputasi berskala universal. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan jasa KAP kecil (*non big four*) cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching* ke KAP yang lebih besar untuk memperoleh kepercayaan yang baik di mata investor.

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan juga akan semakin menarik perhatian investor terutama pihak institusional, sehingga perusahaan membutuhkan jasa audit yang memiliki kredibilitas tinggi untuk menghasilkan opini yang sesuai dengan harapan manajemen. Hal ini mendorong terjadinya perubahan standar auditor/kap yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan yang tumbuh besar akan memerlukan auditor/kap yang memenuhi kriteria perusahaan dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Hal ini yang dapat mempengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching* dalam suatu perusahaan.

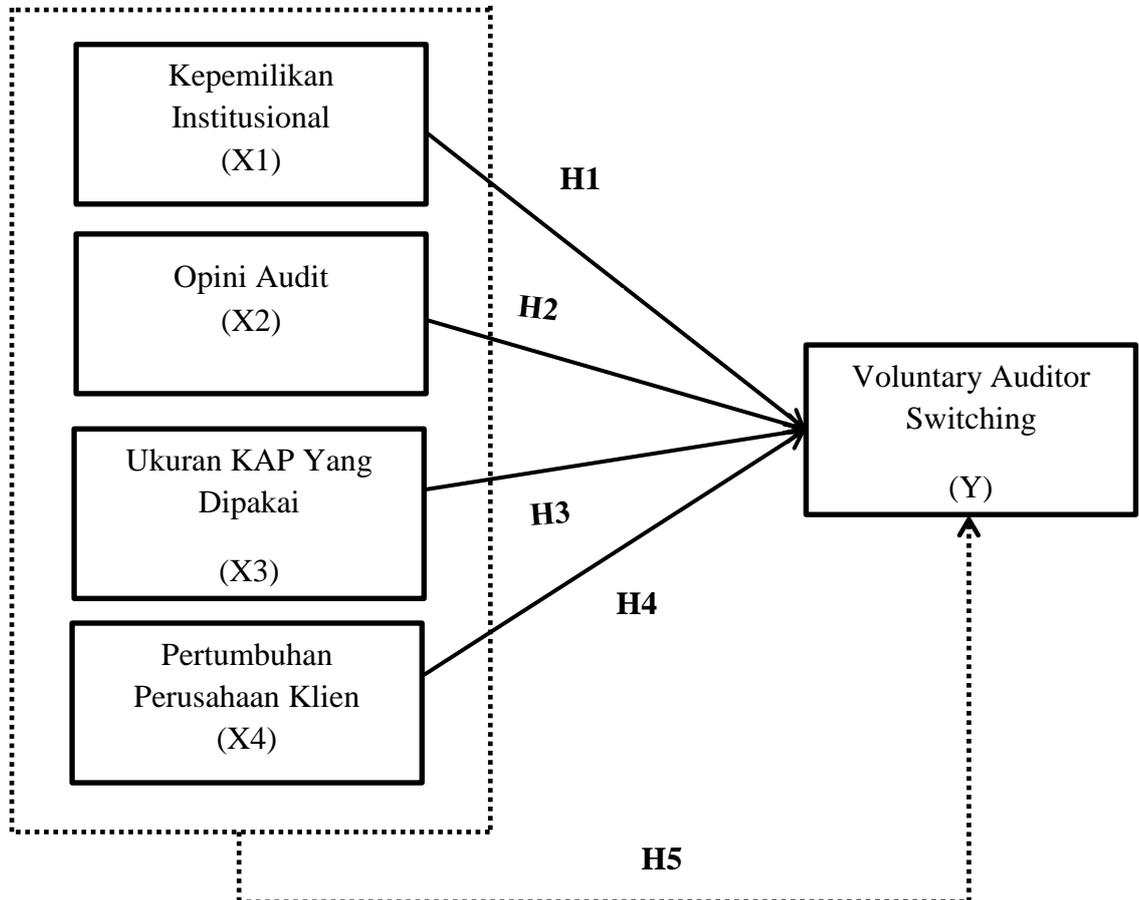
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, opini audit, ukuran kap yang dipakai, dan pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H5 : Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Ukuran KAP Yang Dipakai, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori, hubungan antar variabel, dan pengembangan hipotesis diatas, maka peneliti mengidentifikasi bahwa kepemilikan institusional, opini audit, ukuran KAP yang dipakai, dan pertumbuhan perusahaan klien sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching* perusahaan sebagai variabel dependen penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

- > : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap voluntary auditor switching (parsial).
-> : Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap voluntary auditor switching (simultan).